

MEMACU AMBISI MENUJU MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN DI INDONESIA





DAFTAR ISI

- 04 **Tentang laporan ini**
- 05 **Temuan utama**
- 06 **Menetapkan konteks**
- 08 **Transparansi belum diikuti sektor hulu**
- 10 **Risiko yang besar**
- 15 **Mengubah risiko menjadi peluang**
- 18 **Meningkatnya tata kelola perusahaan**
- 21 **Ketertelusuran**
- 23 **Sertifikasi**
- 25 **Mengubah rantai pasok**
- 28 **Dukungan terhadap petani**
- 30 **Mengatasi kompleksitas rantai pasok melalui pendekatan multipemangku kepentingan**
- 32 **Berinvestasi pada perlindungan dan pemulihan ekosistem**
- 34 **Kesimpulan**



Untuk mengunduh jawaban lengkap perusahaan, silahkan gunakan tautan berikut
<https://www.cdp.net/en/responses>

Pemberitahuan penting

Isi laporan ini dapat digunakan oleh siapa saja dengan mencantumkan CDP sebagai sumbernya, akan tetapi tidak serta merta memberikan izin untuk mengemas ulang atau menjual kembali data yang dilaporkan kepada CDP. Jika hendak mengemas ulang atau menjual kembali isi laporan ini, Anda harus memperoleh izin dari CDP sebelum melakukannya.

CDP telah menyusun data dan analisis dalam laporan ini berdasarkan respons terhadap kuesioner hutan CDP 2020. CDP sama sekali tidak memberikan pernyataan atau jaminan (tegas ataupun tidak) mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi dan pendapat yang dimuat dalam laporan ini. Disarankan untuk tidak bertindak atas dasar informasi yang dimuat dalam publikasi ini jika tidak disertai oleh saran dari ahli/profesional yang terkait. Selama dimungkinkan oleh undang-undang, CDP tidak akan menerima atau mengambil kewajiban, tanggung jawab, atau tugas menanggapi segala konsekuensi yang timbul ketika Anda atau siapa saja bertindak, atau menahan diri untuk bertindak, berdasarkan informasi pada laporan ini atau atas setiap keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Semua informasi dan pendapat yang disajikan dalam laporan ini oleh CDP didasarkan pada penilaian saat ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, industri, atau badan usaha tertentu. Komentar tamu, jika dicantumkan dalam laporan ini, merupakan pendapat dari masing-masing penulis, sehingga pencantumannya tidak dapat diartikan sebagai dukungan atas penulis tersebut.

CDP, badan usaha atau perusahaan anggota yang menjadi afiliasinya, atau masing-masing pemangku kepentingan, anggota, mitra, ketua, direktur, petugas dan/atau karyawan dapat memiliki posisi atau pengaruh dalam sekuritas perusahaan yang dibahas dalam laporan ini. Sekuritas perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini mungkin tidak dapat dijual di beberapa negara bagian atau negara tertentu, dan belum tentu sesuai untuk semua jenis investor mengingat nilai dan pendapatan yang dihasilkan dari sekuritas tersebut bersifat fluktuatif/berubah-ubah dan/atau terkena dampak negatif nilai tukar.

'CDP' berarti CDP North America, Inc. sebuah organisasi nirlaba dengan status amal 501(c)3 di AS, serta CDP Worldwide dengan nomor amal terdaftar 1122330 dan entitas yang dijamin secara terbatas oleh pemiliknya (company limited by guarantee) dengan nomor 05013650 dan terdaftar di Inggris.

© 2020 CDP. Hak cipta dilindungi undang-undang.

TENTANG LAPORAN INI

Laporan ini adalah bagian ketiga dari analisis CDP mengenai komitmen dan tindakan terkait hutan yang diungkap oleh perusahaan yang berhubungan dengan rantai pasok minyak sawit Indonesia.

Pada tahun 2020, 687 perusahaan¹ mengisi kuesioner hutan CDP. Terdapat peningkatan sebanyak 144 dari tahun sebelumnya. Secara global, terdapat 178 perusahaan yang melaporkan penggunaan produk minyak sawit dalam rantai nilainya. Laporan ini berfokus pada 125 perusahaan yang memproduksi, memperoleh pasokan, atau menggunakan produk minyak sawit dari Indonesia.

Ini adalah tahun penting bagi hutan dunia. Tercapainya target Aichi yang ditetapkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological

Diversity/ CBD) dan tinjauan perkembangan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDG) menyoroti kurangnya pelaksanaan komitmen deforestasi dan keanekaragaman hayati. Seiring ditetapkannya tujuan baru, laporan ini memberikan informasi terbaru yang menyeluruh mengenai perkembangan yang telah dicapai oleh sektor korporat dalam melaksanakan komitmen Tanpa Deforestasi, termasuk perubahan struktur tata kelola dan pelibatan rantai pasok, serta memberikan perincian tambahan mengenai pemulihan ekosistem dan inisiatif multipemangku kepentingan.



1. Jumlah total ini mencakup seluruh perusahaan yang merespons dan sudah melengkapi kuesioner hutan CDP 2020 sebelum tanggal 7 September 2020

TEMUAN UTAMA



Dalam kurun waktu satu tahun, potensi dampak keuangan dari risiko terkait hutan telah meningkat dua kali lipat. Pada tahun 2020, potensi dampak di tahun ini secara keseluruhan adalah 10 miliar Dolar AS. Mengingat hanya 44% perusahaan yang memberikan informasi keuangannya, nilai ini masih di bawah potensi dampak sebenarnya.



Peluang terkait hutan bernilai 4,2 miliar Dolar AS, yang mana 31% (1,3 miliar Dolar AS) hampir pasti atau sangat pasti untuk diwujudkan.



Transparansi kian meningkat. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang memproduksi, memperoleh pasokan, atau menggunakan minyak sawit dari Indonesia dan melakukan pengungkapan melalui CDP meningkat 30% dari tahun sebelumnya.



Peningkatan transparansi di antara perusahaan hilir belum diikuti oleh produsen hulu di Indonesia. Dari semua perusahaan minyak sawit yang berlokasi di Indonesia, hanya 9% yang melaporkan tindakannya dengan cara yang sesuai standar, sehingga membatasi penilaian terhadap pelaksanaan komitmen keberlanjutan perusahaan di lapangan.



Ketertelusuran hingga ke tingkat perkebunan adalah hal penting bagi perusahaan untuk melaksanakan komitmen Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) secara efektif. Pada tahun ini, belum ada satu pun perusahaan dengan target 100% ketertelusuran pasokan hingga ke tingkat perkebunan dengan batas waktu 2020 yang berhasil mencapai tujuannya.



Meskipun merupakan pendekatan baru, 8% perusahaan menyebutkan bahwa mereka menggunakan Pendekatan Yurisdiksional atau Lanskap untuk mendorong pelaksanaan kebijakan dan komitmennya.



Diperlukan partisipasi yang lebih besar dalam pemulihan ekosistem guna meningkatkan kapasitas hutan Indonesia sebagai penyerap karbon dan penyimpan keanekaragaman hayati. Hanya 14% perusahaan yang mendukung atau melaksanakan proyek pemulihan ekosistem dan/atau konservasi di Indonesia.

MENETAPKAN KONTEKS

Hutan dunia sangat penting dalam memitigasi perubahan iklim. Hutan tropis berkontribusi hingga sepertiga dari mitigasi yang diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius². Selain itu, di antara sekian banyak jasa ekosistem yang tersedia bagi manusia, hutan dapat berfungsi sebagai sistem penyangga untuk menurunkan risiko munculnya penyakit zoonosis³. Mengingat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, kebutuhan akan perlindungan dan pemulihan hutan dunia semakin jelas.

Meskipun berperan sangat penting, hilangnya hutan terus berlanjut dengan laju yang memprihatinkan, sekitar 10 juta hektar hutan lenyap setiap tahunnya antara tahun 2015 dan 2020⁴. Perluasan pertanian semakin menjadi faktor pendorong terbesar deforestasi dan degradasi hutan serta mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati hutan. Antara tahun 2000 dan 2011, produksi dan konsumsi komoditas berisiko terhadap hutan, seperti ternak sapi, kedelai, produk kayu, dan minyak sawit menjadi penyebab hilangnya 40% hutan tropis⁵.

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar keempat⁶ sekaligus penghasil minyak sawit terbesar. Di Pulau Kalimantan (salah satu pulau dengan keanekaragaman hayati tertinggi di nusantara dan merupakan wilayah utama penghasil minyak sawit), produksi minyak sawit industri yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan hilangnya 350.000 hektar hutan setiap tahun antara tahun 2005 dan 2015⁷ dan mengancam populasi spesies yang penting bagi ekosistem seperti Orangutan⁸. Kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Indonesia pada tahun 2019 telah menghanguskan kawasan yang setara dengan setengah wilayah Belgia atau seluas lebih dari 16.000 kilometer persegi, dan melepaskan 708 megaton karbon dioksida (CO₂) ke atmosfer^{9 10}.

Terlepas dari rekam jejak yang buruk, dalam tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan yang cukup signifikan pada laju hilangnya hutan. Pada tahun 2019, Indonesia mencatatkan penurunan sebesar 5% pada hilangnya hutan primer jika dibandingkan tahun 2018¹¹. Sehingga berdasarkan perjanjian REDD+ dengan Pemerintah Norwegia, Indonesia akan menerima 56,5 juta Dolar AS karena telah mengurangi 11,2 juta ton CO₂ ekuivalen¹².

Regulasi global dan kekuatan pasar menciptakan lingkungan yang mendukung bagi minyak sawit berkelanjutan. Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab (*Principles for Responsible Investment/ PRI*) PBB melalui Kelompok Kerja Minyak Sawit Berkelanjutan telah mendorong investor untuk mengatasi deforestasi pada sektor ini. Pada tahun 2019, sebanyak 62 investor dengan aset sekitar 8 triliun Dolar AS yang dikelolanya mengeluarkan pernyataan yang mendukung industri minyak sawit berkelanjutan¹³.

Negara-negara pengimpor memfasilitasi permintaan minyak sawit berkelanjutan ini melalui regulasi khusus deforestasi. Sebagai bagian dari Strategi Keanekaragaman Hayati yang visioner yang dikeluarkannya, Uni Eropa tengah menyusun usulan undang-undang dan mendukung langkah-langkah

2. Shyamsundar, P., & Miller, M. (2019). How Much Does It Cost to Save Tropical Forests and Prevent Climate Change? Diperoleh dari <https://blog.nature.org/science/science-brief/how-much-does-it-cost-to-save-tropical-forests-and-prevent-climate-change/>
3. Jordan, R. (2020). Understanding spread of disease from animals to human. Diperoleh dari <https://news.stanford.edu/2020/04/08/understanding-spread-disease-animals-human/>
4. FAO & UNEP. (2020). The State of the World's Forests 2020. Diperoleh dari <http://www.fao.org/state-of-forests/en/>
5. Focali (2015). Agriculture commodity consumption and trade responsible for over 40% of tropical deforestation. Diperoleh dari <http://www.focali.se/filer/Focali%20brief%202015-03%20Consumption%20Trade%20and%20Tropical%20Deforestation.pdf>
6. Butler, R. (2019). Countries with the most species. Diperoleh dari https://rainforests.mongabay.com/03highest_biodiversity.htm
7. Gaveau, D. et. al. (2016). Rapid conversions and avoided deforestation: Examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo. Diperoleh dari <https://www.nature.com/articles/srep32017>
8. Meijaard, E. et. al. (2018): Oil palm and biodiversity. Diperoleh dari <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-027-En.pdf>
9. Jong, H. N. (2020). As 2020 fire season nears, Indonesian president blasts officials for 2019. Diperoleh dari <https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-forest-fires-widodo-jokowi-burning-2019-emissions/>
10. Copernicus. (2019). A year in fire. Diperoleh dari <https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-year-fire>
11. WRI. Global Forest Watch. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN>
12. Jong, H. N. (2020). Indonesia to receive \$56m payment from Norway for reducing deforestation. Diperoleh dari <https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-norway-redd-payment-deforestation-carbon-emission-climate-change/>
13. United Nations Principles for Responsible Investment. (2020). PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil. Diperoleh dari <https://www.unpri.org/sustainable-land-use/pri-investor-working-group-on-sustainable-palm-oil/5873.article>

untuk menghindari atau meminimalkan distribusi produk-produk yang berkaitan dengan deforestasi atau degradasi hutan di pasar Uni Eropa¹⁴. Prancis telah mengesahkan Deklarasi Amsterdam yang mendukung rantai pasok yang sepenuhnya berkelanjutan pada tahun 2020¹⁵. Sebagai bagian dari 'Rencana Iklim' yang dimilikinya, Prancis telah berkomitmen untuk menghentikan deforestasi yang disebabkan oleh hutan dan impor komoditas pertanian yang tidak lestari pada tahun 2030¹⁶. Di tahun 2020, Pemerintah Kerajaan Inggris berjanji untuk melarang perusahaan menggunakan komoditas yang diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi ilegal¹⁷.

Namun, UU Omnibus Law yang diusulkan Pemerintah Indonesia dan disahkan pada bulan Oktober 2020 dapat menjadi ancaman bagi kemajuan yang telah dicapai saat ini. Meskipun UU ini awalnya disusun untuk merampingkan regulasi dan memberikan insentif bagi investasi, tetapi banyak pihak yang menganggap

UU ini sebagai ancaman bagi hak asasi manusia dan perlindungan hutan^{18 19} karena kelonggarannya pada persyaratan perizinan lingkungan dan sosial²⁰. Akibatnya, 36 investor global mendesak Pemerintah Indonesia untuk berpihak pada konservasi hutan dan lahan gambut dalam rencana pemulihan ekonomi pasca pandemi²¹.

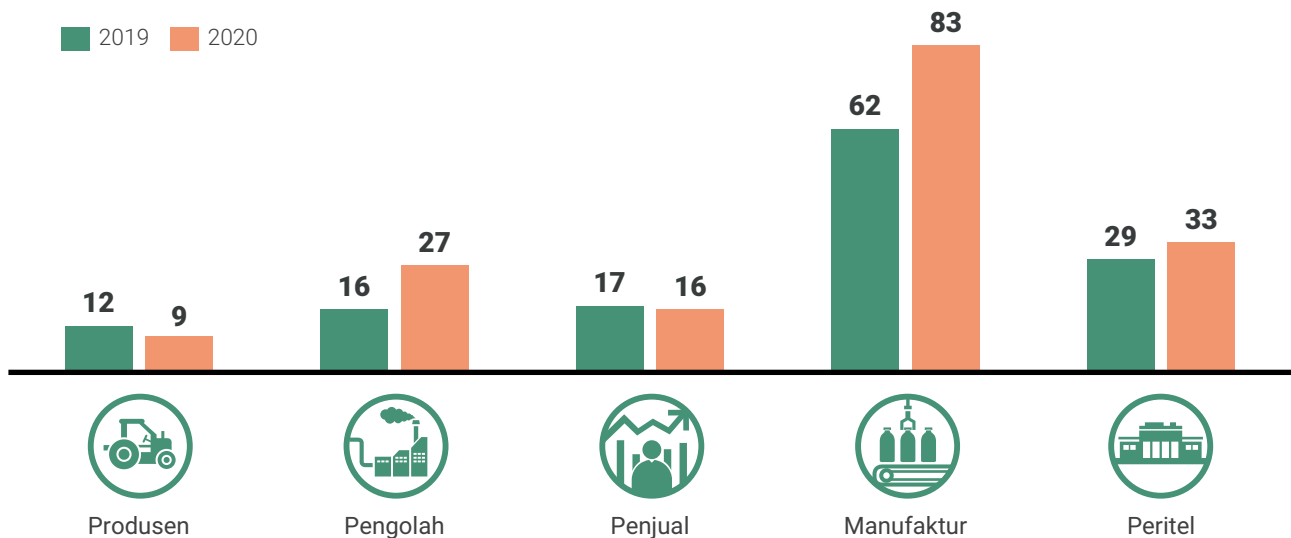
Terdapat kasus bisnis yang jelas untuk mengubah dan meningkatkan keberlanjutan rantai pasok komoditas minyak sawit. Selain itu, peningkatan tekanan dari investor dan konsumen, ditambah dengan risiko terganggunya rantai pasok, mendorong perubahan dalam perilaku perusahaan. Terlepas dari kerugian finansial terkait pandemi Covid-19 dan kemungkinan pelanggaran persyaratan perizinan lingkungan di Indonesia, sangat penting bagi perusahaan untuk tidak melupakan reputasi dan ketahanan jangka panjang yang diperoleh dari penerapan rantai pasok yang berkelanjutan.



14. European Commission (2020). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Biodiversity Strategy 2030. Diperoleh dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380>
15. Amsterdam Declaration. (2015). Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries. Diperoleh dari <https://ad-partnership.org/wp-content/uploads/2018/10/Amsterdam-Declaration-Deforestation-Palm-Oil-v2017-0612.pdf>
16. Gouvernement. (2018). Ending deforestation caused by importing unsustainable products. Diperoleh dari <https://www.gouvernement.fr/en/ending-deforestation-caused-by-importing-unsustainable-products>
17. Department for Environment, Food & Rural Affairs. (2020). World-leading new law to protect rainforests and clean up supply chains. Diperoleh dari <https://www.gov.uk/government/news/world-leading-new-law-to-protect-rainforests-and-clean-up-supply-chains>
18. Pandjaitan, M. (2020). Omnibus Law in Indonesia. Diperoleh dari <https://www.legalbusinessonline.com/omnibus-law-indonesia-brought-you-iabf>
19. Jong, H. N. (2020). Indonesia bill weakening environmental safeguards to pass in October. Diperoleh dari <https://news.mongabay.com/2020/08/indonesia-omnibus-deregulation-bill-pass-october/>
20. Greenpeace Southeast Asia. (2020). Warning: Omnibus Law is Threatening Indonesia's Sustainable Investment. Diperoleh dari <https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/43752/warning-omnibus-law-is-threatening-indonesias-sustainable-investment/>
21. Green Century Funds (2020). Open letter to Omnibus Bill on Job Creation. The statement is endorsed by 36 investors representing approximately USD4.1 trillion in AUM. Diperoleh dari <https://www.greencentury.com/wp-content/uploads/2020/10/Indonesian-Omnibus-Investor-Letter.pdf>

TRANSPARANSI BELUM DIKUTI SEKTOR HULU

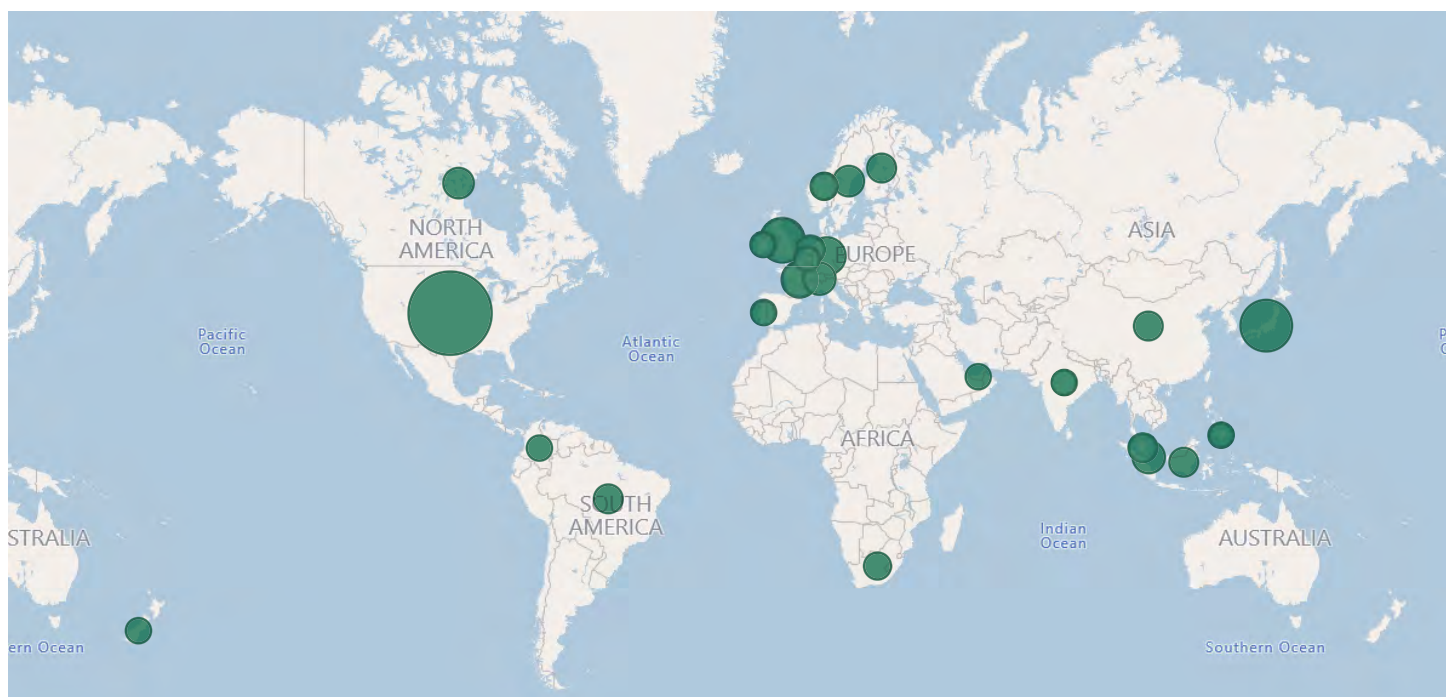
Saat ini, semakin banyak perusahaan yang memproduksi, memperoleh pasokan, atau menggunakan produk minyak sawit Indonesia yang memilih untuk melakukan pengungkapan melalui CDP. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan perusahaan yang melakukan pengungkapan sebesar 30% dibanding tahun 2019 (dari 96 menjadi 125 perusahaan). Komitmen terhadap transparansi ini sebagian besar didorong oleh pengungkapan perusahaan manufaktur (lih. Gambar 1).



Gambar 1 - Jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui CDP, diurai berdasarkan tahap rantai pasok²²

Hampir setengah dari perusahaan yang melakukan pengungkapan tersebut beroperasi di sektor makanan, minuman, dan pertanian (49%), sementara lainnya bergerak di sektor bahan (25%), ritel (18%), horeka (hotel,

restoran, kafe) (5%), dan lainnya (4%). Sebagian besar perusahaan ini berkantor pusat di negara-negara maju dengan regulasi ketat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis.



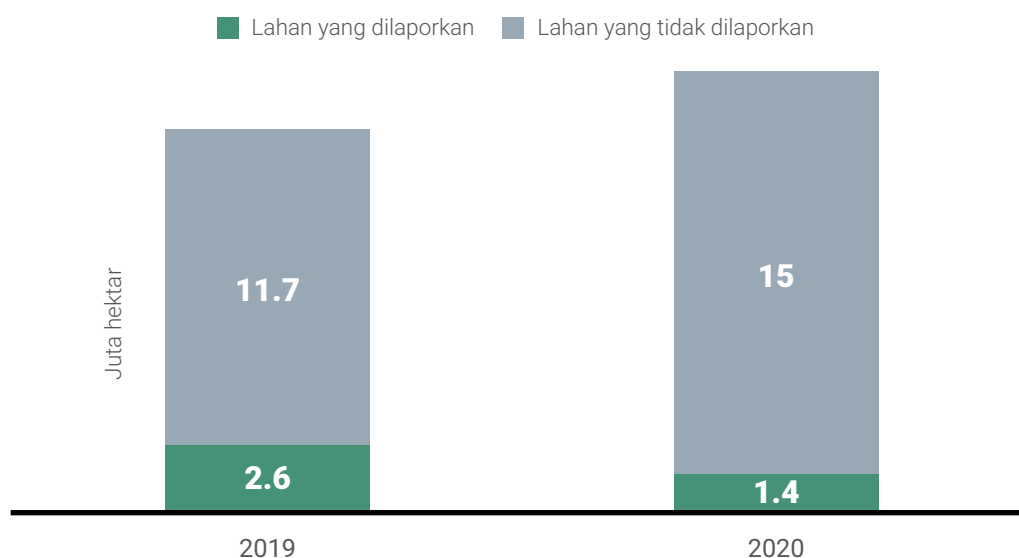
Gambar 2 – Peta kantor pusat perusahaan

22. Berdasarkan sifat bisnisnya suatu perusahaan dapat beroperasi di beberapa tahap rantai pasok. Nilai dalam grafik tidak menunjukkan perusahaan yang berbeda.

Meskipun pengungkapan terkait minyak sawit semakin meningkat, komitmen terhadap transparansi ini belum diikuti oleh produsen minyak sawit di Indonesia. Pada tahun 2020, CDP mengundang 22 produsen yang sebagian besar merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berbasis di Indonesia, untuk mengisi kuesioner, tetapi hanya dua perusahaan yang mengisinya.

Di Indonesia, total luas lahan sawit telah meningkat dari 14,2 juta hektar²³ pada tahun 2018 menjadi 16,4 juta hektar pada tahun 2019²⁴. Namun perusahaan

yang memberikan data lahannya melalui CDP mengungkapkan kendali atas 1,4 juta hektar²⁵ lahan saja. Cakupannya juga menurun, yakni dari 2,6 juta hektar pada tahun 2019, karena berkurangnya jumlah produsen yang melakukan pengungkapan melalui CDP tahun ini. Hal ini memprihatinkan karena berarti terdapat 90% kawasan konsesi sawit Indonesia yang tidak dilaporkan dengan cara yang mengikuti standar dan mudah dibandingkan, sehingga menghambat investor, pembeli, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai risiko terkait produksi dan perolehan pasokan produk minyak sawit dari Indonesia.



Gambar 3 – Sebagian besar konsesi sawit Indonesia (berdasarkan luasan) tidak dilaporkan dengan cara yang mengikuti standar dan mudah dibandingkan

23. Kementerian Pertanian Indonesia (2018). Di Mana Lahan Sawit Terluas di Indonesia? Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/di-mana-lahan-sawit-terluas-di-indonesia>

24. Kemenko Perekonomian Indonesia (2019) Inilah 10 Provinsi dengan Lahan Perkebunan Sawit Terluas. Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/21/inilah-10-provinsi-dengan-lahan-perkebunan-sawit-terluas>

25. Mencakup lahan milik, konsesi/sewa, dan petani plasma.

RISIKO YANG BESAR

Perusahaan semakin sadar akan risiko dalam memproduksi, memperoleh pasokan, atau menggunakan produk-produk sawit yang tidak berkelanjutan. Pada tahun 2020, sebanyak 89% (111) perusahaan melakukan penilaian risiko terkait hutan sebagai langkah pertama dalam memahami dan mengukur potensi dampak usaha. Selain itu, sebanyak 37% (46) perusahaan melaporkan bahwa proses internal mereka untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terkait hutan diintegrasikan sebagai kerangka pengelolaan risiko tingkat badan usaha, dan 41% (51) perusahaan menilai risiko berdasarkan praktik terbaik²⁶.

Sebagian besar (97) perusahaan telah menemukan setidaknya satu risiko terkait hutan yang berpotensi menimbulkan dampak keuangan atau strategis yang signifikan bagi bisnis mereka. **Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan ini melaporkan bahwa**

kemungkinan dampak keuangan yang terkait dengan risiko ini bernilai lebih dari 10 miliar Dolar AS. Mengingat kurang dari separuh perusahaan yang menyediakan informasi keuangannya, perhitungan ini kemungkinan masih di bawah potensi dampak keuangan sebenarnya.

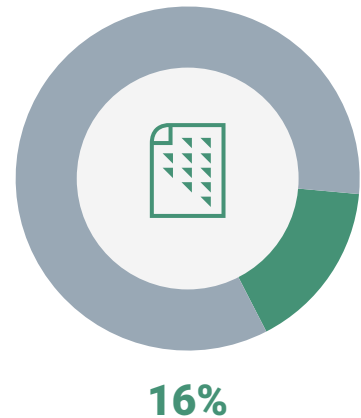
Risiko terhadap Reputasi dan Pasar



Risiko Fisik



Risiko Peraturan



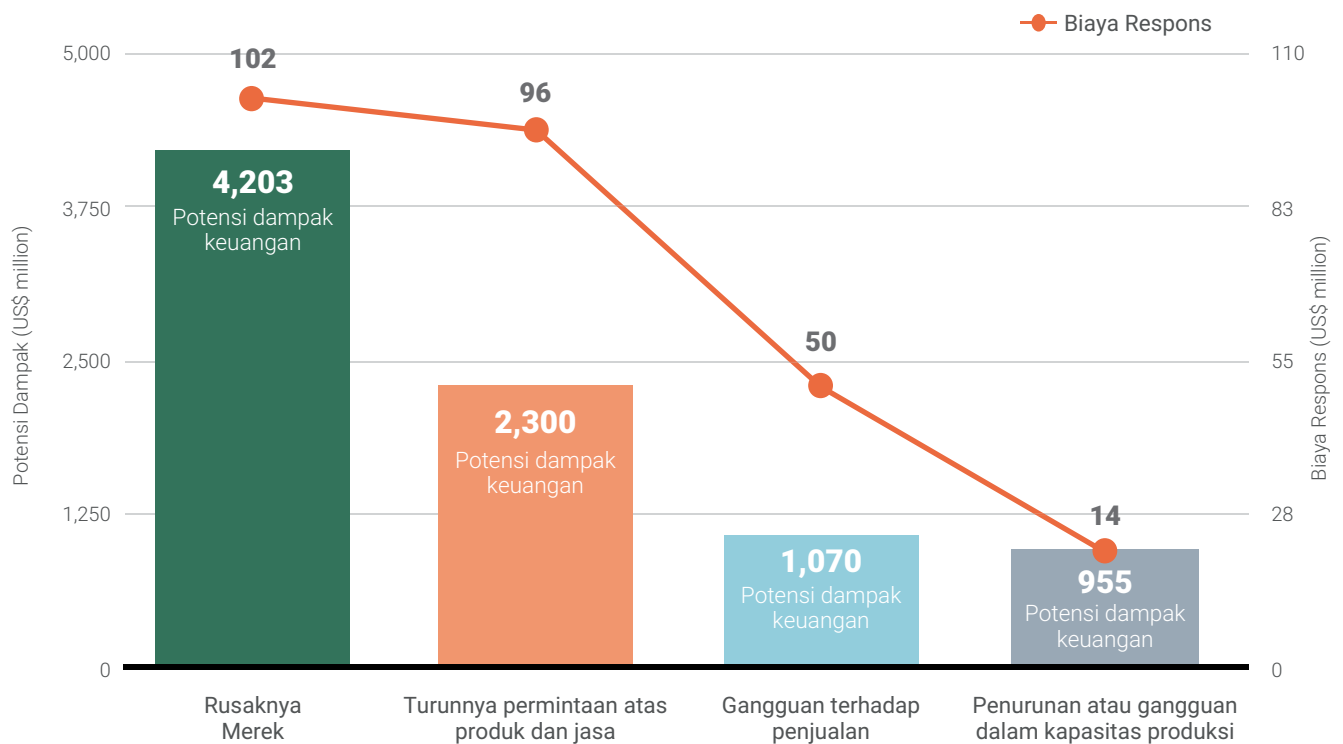
Gambar 4 - Perusahaan melaporkan eksposur terbesar terhadap risiko reputasi dan pasar terkait hutan

Risiko reputasi dan pasar adalah risiko yang paling umum, dan dilaporkan oleh 66% (82) perusahaan. Hal ini tidak mengejutkan mengingat semakin meningkatnya tekanan dari investor dan konsumen untuk pasokan minyak sawit berkelanjutan. **Kerusakan merek adalah risiko keuangan terbesar dengan potensi dampak keuangan mencapai 4,2 miliar Dolar AS** (Gambar 5).

Survei terbaru oleh Boston Consulting Group menyoroti bahwa konsumen lebih sadar akan persoalan lingkungan sejak munculnya pandemi Covid-19²⁷. Terdapat peningkatan tekanan, terutama dari kelompok usia 25-44 tahun, kepada perusahaan agar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam produk-produknya.

26. 'Praktik terbaik' didefinisikan sebagai penilaian tahunan, atau lebih dari sekali dalam setahun, dan menggunakan horizon jangka panjang lebih dari enam tahun.

27. BCG. (2020). The Pandemic Is Heightening Environmental Awareness. Diperoleh dari <https://www.bcg.com/publications/2020/pandemic-is-heightening-environmental-awareness>



Gambar 5 - Perkiraan biaya respons yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi dampak keuangan yang dihadapi perusahaan (juta Dolar AS)



Nilai Merek

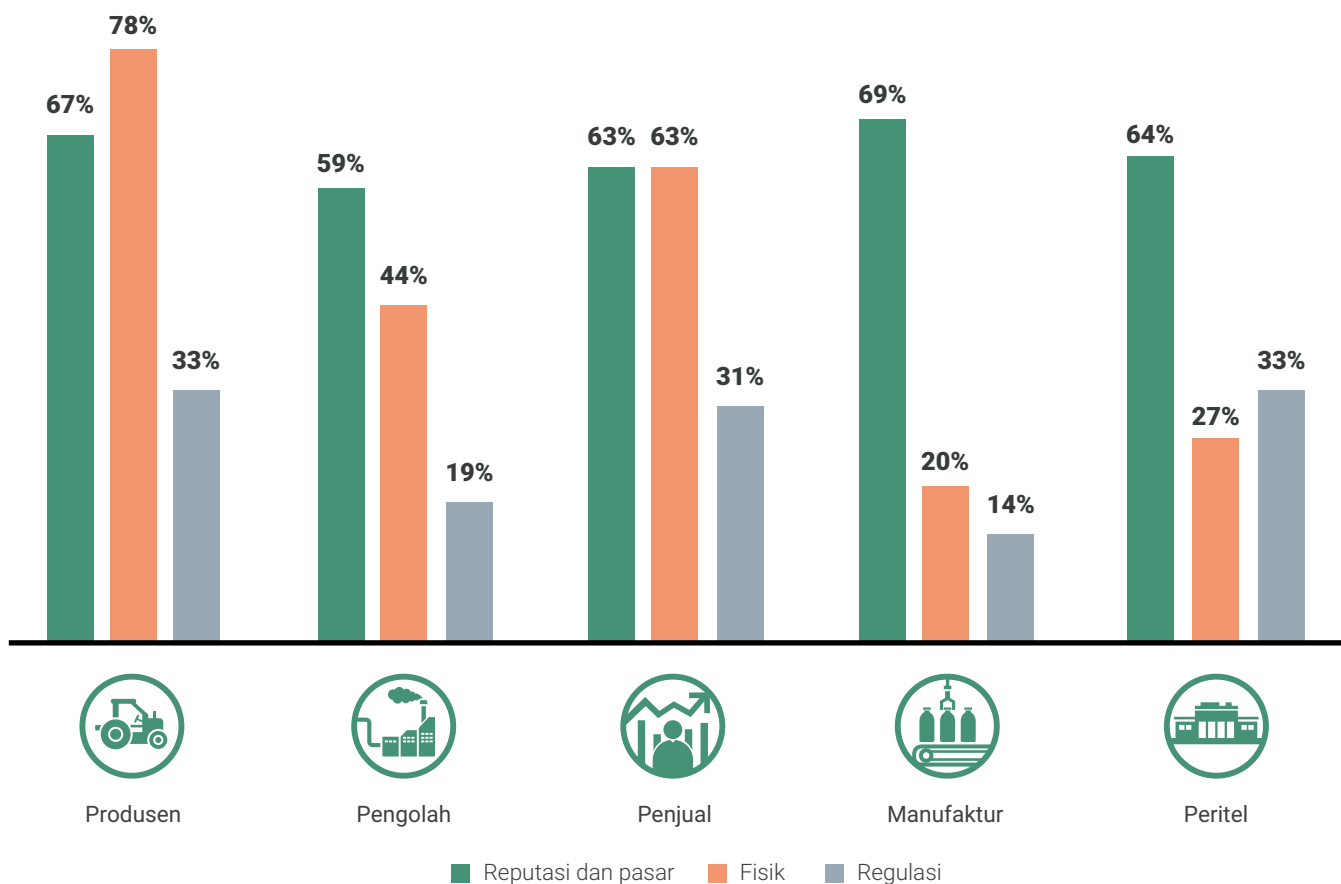
Minyak sawit adalah salah satu bahan baku pertanian utama **Unilever** dan terkandung dalam sebagian besar produknya. Perusahaan ini mengonsumsi kurang dari 1 juta ton minyak sawit beserta turunannya setiap tahun. Unilever menyadari bahwa kampanye LSM yang mengaitkan produk-produknya dengan deforestasi dapat menyebabkan boikot dari konsumennya, terutama dari negara-negara maju. Unilever telah memperkirakan risiko keuangan sebesar **185,7 juta Dolar AS** (setara dengan 0,3% dari pengeluaran operasionalnya)²⁸. Guna memitigasi ancaman terhadap mereknya, Unilever tengah berinvestasi dalam perolehan pasokan produk bersertifikat RSPO untuk meningkatkan pasokan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat, beserta dengan program dan pemantauan ketertelusuran rantai pasok²⁹.

28. Angka didasarkan pada Laporan Tahunan dan Akun Unilever 2019. Diperoleh dari https://www.unilever.com/Images/unilever-annual-report-and-accounts-2019_tcm244-547893_en.pdf

29. Isian Unilever dalam kuesioner hutan CDP 2020

Sebaliknya, hanya 16% perusahaan yang melaporkan keterpaparannya terhadap risiko peraturan. Angka ini cukup mengejutkan, mengingat semakin ketatnya peraturan mengenai minyak sawit dan komoditas lainnya yang berisiko pada hutan, baik di Indonesia maupun negara pengimpor. Hal ini mencakup perpanjangan moratorium konsesi sawit Indonesia yang berlaku sejak tahun 2011³⁰; revisi regulasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan meningkatnya jumlah usulan internasional seperti usulan undang-undang Inggris baru-baru ini mengenai penggunaan produk bebas deforestasi³¹. Risikonya nyata, Pada bulan September 2020, laporan adanya praktik kerja paksa menyebabkan minyak sawit dan produk turunan minyak sawit **FGV Holding Berhad** dicekal oleh otoritas Bea Cukai dan Perbatasan AS, sehingga hal ini mengakibatkan penurunan langsung nilai saham perusahaan³².

Risiko yang dihadapi perusahaan bergantung pada tingkatan operasinya dalam rantai pasok. Meskipun risiko reputasi dan pasar ditemukan di seluruh rantai pasok, risiko fisik merupakan risiko yang paling banyak dilaporkan oleh produsen yang kemungkinan disebabkan oleh kedekatan dan pengaruh langsungnya terhadap proses produksi (Gambar 6). Hal ini memprihatinkan karena risiko fisik juga dapat memiliki dampak tidak langsung yang signifikan terhadap perusahaan sektor hilir. **Oriflame**, sebuah perusahaan manufaktur, telah menyadari bahwa peristiwa cuaca ekstrem dan konsekuensinya yang berupa penurunan pasokan minyak sawit dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi dan menghambat perusahaan dalam mencapai komitmen sertifikasinya³³.



Gambar 6 - Jenis risiko berdasarkan tahap rantai pasok

30. The Jakarta Post. (2020). Oil palm moratorium: The future offered. Diperoleh dari <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/12/15/oil-palm-moratorium-the-future-offered.html>

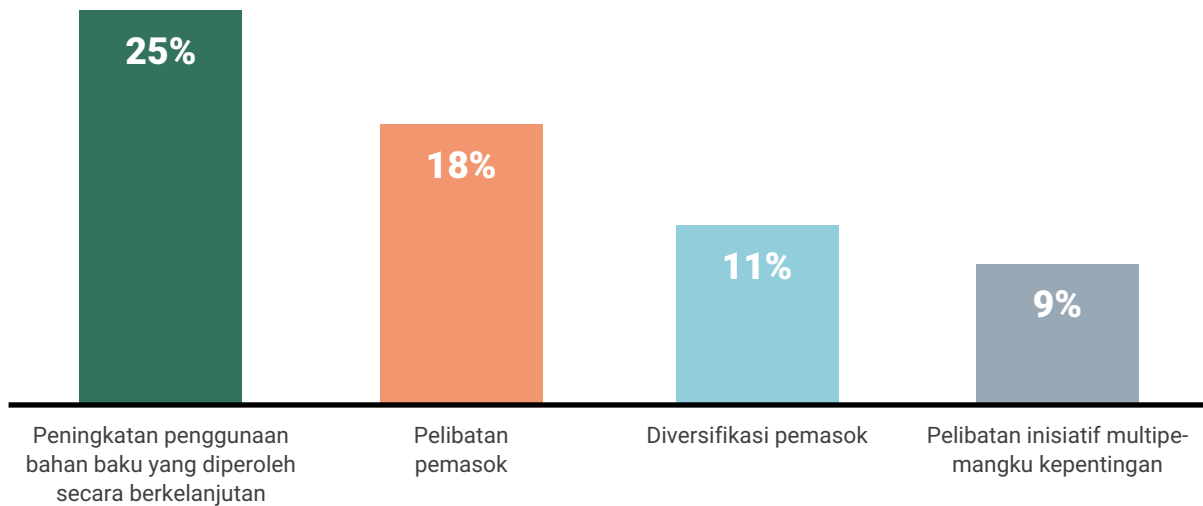
31. Department for Environment, Food & Rural Affairs. (2020). World-leading new law to protect rainforests and clean up supply chains. Diperoleh dari <https://www.gov.uk/government/news/world-leading-new-law-to-protect-rainforests-and-clean-up-supply-chains>

32. Bloomberg. (2020, September 30). US Blocks Palm Oil Imports From Malaysia's FGV On of World's Top Producers. Diperoleh dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-30/u-s-blocks-palm-oil-imports-from-one-of-world-s-top-producers>

33. Isian Oriflame dalam kuesioner hutan CDP 2020

Sebagian besar perusahaan merespons risiko yang muncul dengan meningkatkan penggunaan bahan baku yang diperoleh secara berkelanjutan, melibatkan pemasok, dan mendiversifikasi pasokannya (lih. Gambar

7). Berdasarkan analisa CDP, **biaya untuk mencegah terjadinya risiko hanyalah sekitar 3% dari potensi biaya risiko terkait.**



Gambar 7 - Cara perusahaan merespons risiko yang muncul





Kebakaran hutan



PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) berkomitmen terhadap praktik pembukaan lahan tanpa pembakaran, sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional, serta prinsip-prinsip RSPO, ISPO, dan ISCC. Meski demikian, kebakaran masih menjadi risiko material yang cukup besar, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. **ANJ memperkirakan nilai keuangan akibat risiko ini dapat berkisar antara 1 sampai 10 juta Dolar AS, atau setara dengan sekitar 7% pengeluaran operasional ANJ pada tahun 2019³⁴.** Kebakaran tidak hanya mengancam persediaan potensi sawit di kebun (*standing stock*) dalam konsesinya, tetapi juga membahayakan makhluk hidup yang tinggal di kawasan konservasinya. Guna memitigasi risiko ini, ANJ melakukan penilaian risiko kebakaran untuk memahami sifat risiko di seluruh lanskap yang dikelolanya dan menerapkan respons yang proporsional, yang termasuk: melatih pemadam kebakaran dan tim patroli, memasang menara pemantau dan tanda peringatan kebakaran, penggunaan data satelit dan patrol udara menggunakan pesawat nirawak (*drone*) sebagai sistem peringatan dini serta membangun kesadaran masyarakat sebelum dan selama musim kemarau³⁵.



Hambatan bagi pertumbuhan



Minyak sawit adalah salah satu bahan utama produk pembersih buatan **Lion Corporation**, termasuk detergen cuci dan sabun mandi. Perusahaan ini menyadari kemungkinan munculnya risiko reputasi jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan persoalan lingkungan dalam rantai pasoknya. Berbagai tantangan seperti deforestasi ilegal dan pelanggaran hak masyarakat dapat menurunkan pasokan bahan baku berkelanjutan dan memengaruhi penjualan. **Potensi kerugian akibat hilangnya peluang penjualan diperkirakan sebesar 90 juta Dolar AS, atau setara dengan 3% penjualan bersih tahun 2019³⁶.** Untuk menekan risiko ini, Lion Corporation telah mengeluarkan kebijakan pengadaan pemasok berkelanjutan dan melakukan pengadaan minyak sawit yang tersertifikasi³⁷.



34. Angka didasarkan pada Pernyataan Keuangan Tahunan Keuangan 19 ANJ Group. Diperoleh dari <https://anj-group.com/en/financial-report>

35. Isian Austindo Nusantara Jaya dalam kuesioner hutan CDP 2020

36. Angka didasarkan pada Ikhtisar Data Keuangan Lion Corporation tahun 2019. Diperoleh dari <https://www.lion.co.jp/en/ir/finance/result/>

37. Isian Lion Corporation dalam kuesioner hutan CDP 2020

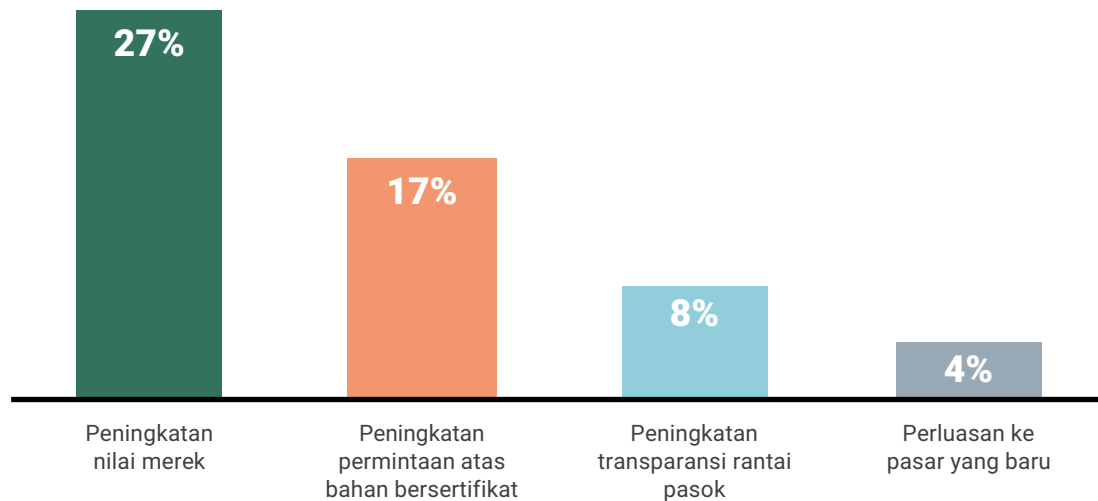
MENGUBAH RISIKO MENJADI PELUANG

Sebagian besar (95) perusahaan telah mengidentifikasi peluang terkait hutan di dalam operasinya. Nilai merek dan peningkatan permintaan akan bahan bersertifikat adalah peluang yang paling sering dilaporkan, hal ini menyoroti dampak perubahan preferensi konsumen terhadap strategi perusahaan.

Terdapat peluang yang cukup besar bagi perusahaan yang memilih untuk bertransformasi dan menghilangkan deforestasi dari rantai pasoknya. **Total nilai peluang terkait hutan dari 34 perusahaan yang dapat memberikan perkiraan finansialnya adalah 4,2 miliar Dolar AS. Dari nilai ini, hampir 31% di antaranya (1,3 miliar Dolar AS) hampir pasti atau sangat pasti.**

Selain itu, nilai finansial peluang terkait hutan dapat meningkat karena didorong oleh insentif pasar dan menguatnya preferensi konsumen terhadap produk berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Stern Centre for Sustainable Business dari New York University menunjukkan bahwa produk yang dipasarkan sebagai produk yang 'berkelanjutan' mengungguli produk lain yang setara³⁸.

Investasi untuk Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG) semakin meningkat dengan diterbitkannya obligasi berkelanjutan senilai 130 miliar Dolar AS secara global pada triwulan kedua tahun 2020 yang merupakan triwulan dengan total tertinggi sejak pencatatan dimulai tahun 2015³⁹. Pada tahun 2019, penjual produk pertanian COFCO memperoleh fasilitas pinjaman terkait keberlanjutan senilai 2,3 miliar Dolar AS dari 21 bank internasional⁴⁰. COFCO akan memperoleh potongan bunga jika dapat mencapai target kinerja keberlanjutan, termasuk ketertelusuran. Selain itu, sejak tahun 2017, Wilmar telah menerima pinjaman terkait keberlanjutan dengan nilai suku bunga sesuai kinerja ESGnya^{41 42 43}.



Gambar 8 - Meningkatnya nilai merek memberi peluang yang begitu besar

38. Kronthal-Sacco, R., & Whelan, T. (2020). CSB Sustainable Market Share Index™.

Diperoleh dari <https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/center-sustainable-business/research/research-initiatives/csb-sustainable-market-share-index>

39. Refinitiv, 2020. Reports 2020 Q2 - Sustainable Finance Review.

Diperoleh dari <https://thesource.refinitiv.com/thesource/getfile/index/a9687f16-6ee6-498a-a26b-0d5a3552b062>

40. COFCO international, 2019. COFCO International Successfully Completes USD 2.3 Billion Sustainability-Linked Facilities.

Diperoleh dari <https://www.cofcointernational.com/newsroom/cofco-international-successfully-completes-usd-23-billion-sustainability-linked-facilities>

41. ING dan Wilmar International, 2017. Wilmar And ING Collaborate on Sustainable Loan In Asia

Diperoleh dari <https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/11/Joint-Press-Release-Wilmar-and-ING-collaborate-on-sustainable-loan-in-Asia.pdf>

42. Bank OCBC dan Wilmar International, 2018. OCBC Bank Partners Wilmar On Largest Sustainability-Linked Bilateral Loan by A Singapore Bank.

Diperoleh dari https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/resource/WIL_News_Release_dd8June2018_OCBC_Sustainability-Linked_Bilateral_Loan

43. DBS, 2018. DBS And Wilmar Sign USD 100 Million Sustainability-Linked Loan.

Diperoleh dari <https://www.dbs.com/newsroom/>



Pasar



Carrefour memperkirakan **potensi nilai dari penjualan produk minyak sawit berkelanjutan dapat mencapai 140 juta Dolar AS**. Carrefour memanfaatkan peluang ini dengan mempromosikan produk minyak sawit berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian konsumen terhadap persoalan gizi dan lingkungan. Guna memenuhi permintaan terhadap bahan berkelanjutan ini, Carrefour berupaya memperoleh sertifikasi pihak ketiga, membangun hubungan yang lebih erat dengan para pemasoknya, dan menyematkan merek dagang RSPO pada produk-produknya untuk menyampaikan komitmen mereka terhadap praktik berkelanjutan secara langsung kepada konsumen⁴⁴.



Produk & jasa



Shisedo memanfaatkan peluang untuk meningkatkan nilai mereknya dengan menambah penggunaan minyak sawit berkelanjutan dalam produk-produknya. **Nilai peluang ini adalah 275 juta Dolar AS**. Shisedo telah memperoleh sertifikasi untuk 100% pasokan minyak sawitnya pada tahun 2018. Hingga tahun 2020, Shisedo telah mendapatkan sertifikasi Rantai Pasok RSPO untuk 17 pabriknya⁴⁵.



44. Isian Carrefour dalam kuesioner hutan CDP 2020

45. Isian Shisedo dalam kuesioner hutan CDP 2020



Efisiensi



L'Oréal menemukan adanya **peluang penghematan biaya terkait rantai pasok yang berketahanan dan berkelanjutan sebesar 51,5 juta Dolar AS**. Melalui kerja sama dengan pemasok langsung dan tidak langsung untuk menghapus deforestasi dari rantai pasoknya, L'Oréal berharap dapat meningkatkan stabilitas ketersediaan dan harga minyak sawit, serta menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan dan merek-mereknya.

Pada tahun 2019, L'Oréal menjalin kemitraan dengan French Agricultural Research Centre for Internasional Development (CIRAD) untuk menyelidiki dampak praktik pertanian pekebun swadaya terhadap kualitas tanah dan produktivitas perkebunan. Tujuan dari kemitraan ini adalah memberikan rekomendasi bagi koperasi petani untuk mendorong peningkatan praktik yang mereka lakukan seraya mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan atau penyalahgunaan pupuk dan herbisida secara berlebihan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas kebun dan menjaga pasokan minyak sawit yang berketahanan dan berkelanjutan bagi L'Oréal⁴⁶.



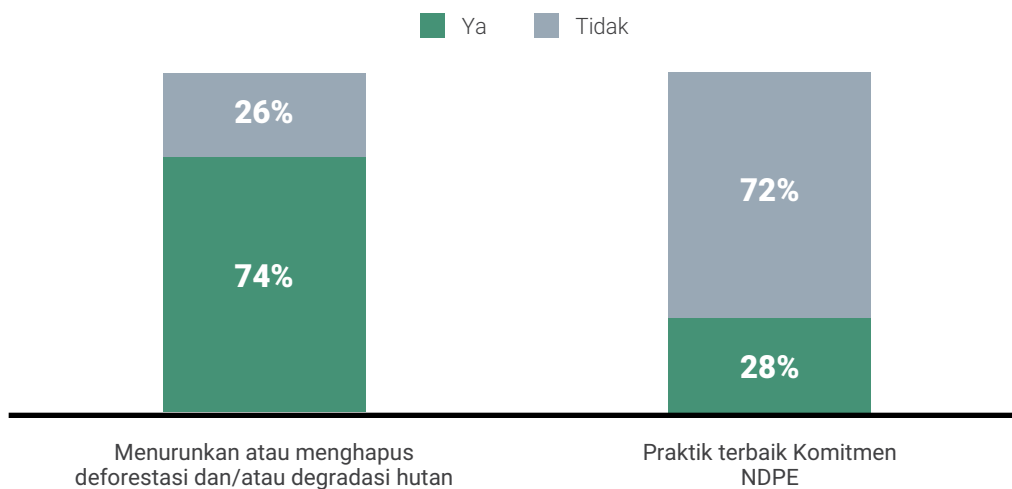
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kepemimpinan perusahaan dalam menekan deforestasi merupakan hal penting dalam membangun reputasi merek yang positif dan memperoleh kepercayaan konsumen. Menurut Edelman Trust Barometer 2019, 76% responden menginginkan para direktur (CEO) memimpin upaya dalam mendorong perubahan dan tidak hanya menunggu tindakan dari pemerintah, sedangkan 56% responden sepakat bahwa mereka dalam posisi yang dapat memberikan dampak positif terhadap persoalan lingkungan⁴⁷.

Pada tahun 2020, 90% (102) perusahaan yang memproduksi, memperoleh pasokan, atau menggunakan produk minyak sawit dari Indonesia memiliki pengawasan di tingkat direksi terhadap persoalan terkait hutan, khususnya di bawah wewenang Direktur Bidang Keberlanjutan. Peningkatan ini cukup signifikan jika dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 80% (64) perusahaan, dan menunjukkan bahwa persoalan terkait hutan semakin sering didiskusikan dan menjadi perhatian di tingkat strategis.

Untuk menghapus deforestasi dari rantai pasok minyak sawit, tata kelola perusahaan yang kuat harus didukung dengan kebijakan hutan yang tegas. Memiliki kebijakan terkait hutan yang mencakup komitmen publik 'Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi'

(NDPE) adalah langkah penting untuk menghapus deforestasi dari rantai pasok dan memenuhi persyaratan investor⁴⁸ dan regulasi. Hanya 28% (35) perusahaan yang memiliki komitmen NDPE⁴⁹ dengan batas waktu dan sebagian besar komitmen ini akan berakhir pada tahun 2020. Perusahaan pengolah dan peritel merupakan dua kelompok yang paling mengkhawatirkan : 74% (20) pengolah dan 76% (15) peritel tidak memiliki komitmen NDPE yang mengikuti praktik terbaik⁵⁰. Hal ini menunjukkan tingkat niat yang sangat rendah dan mengkhawatirkan dalam menghapus deforestasi dari rantai nilai perusahaan.



Gambar 9 - Komitmen publik untuk menghapus atau menurunkan deforestasi dan/atau degradasi hutan melebihi komitmen khusus NDPE

47. Edelman (2019). 2019 Edelman Trust Barometer. Global Report.

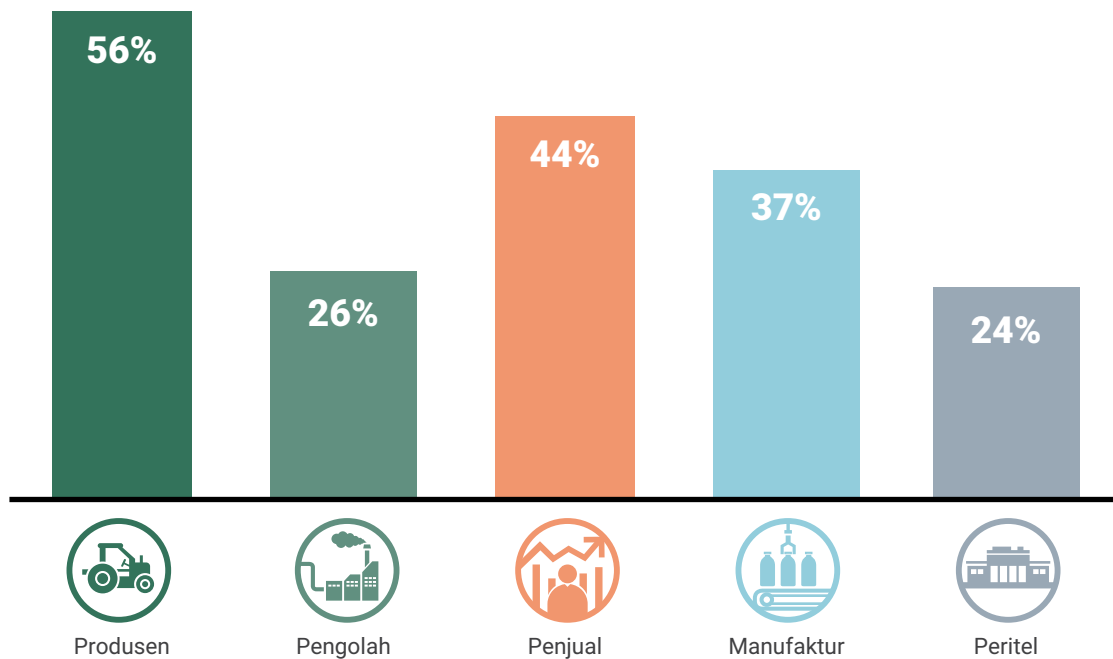
Diperoleh dari https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf

48. United Nations Principles for Responsible Investment. (2020). PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil.

Diperoleh dari <https://www.unpri.org/sustainable-land-use/pri-investor-working-group-on-sustainable-palm-oil/5873.article>

49. Mencakup komitmen secara publik untuk tidak ada konversi ekosistem alami, atau komitmen nol deforestasi kotor/ tanpa deforestasi; tidak ada pengembangan baru di lahan gambut terlepas dari kedalamannya; dan mendapatkan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan masyarakat setempat.

50. CDP mendefinisikan 'praktik terbaik' NDPE disini sebagai komitmen berbatas waktu yang berlaku bagi semua (100%) produksi/konsumsi dan mencakup operasi langsung maupun rantai pasok.



Gambar 10 - Komitmen NDPE berdasarkan tahap rantai nilai



Pemantauan tingkat dewan direksi



Di **Yum! Brands**, Dewan Direksinya mengawasi persoalan ESG. Laporan singkat mengenai hal ini disusun oleh Direktur Bidang Keberlanjutan dan dibahas pada pertemuan tahunan Komite Audit. Mekanisme ini memungkinkan Yum! Brands mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan mengawasi persoalan hutan. Topik utama untuk tahun pelaporan ini mencakup penetapan strategi keberlanjutan terbaru dan peninjauan kemajuan sesuai target yang berkaitan dengan hutan⁵¹.



51. Isian Yum! Brand dalam kuesioner hutan CDP 2020

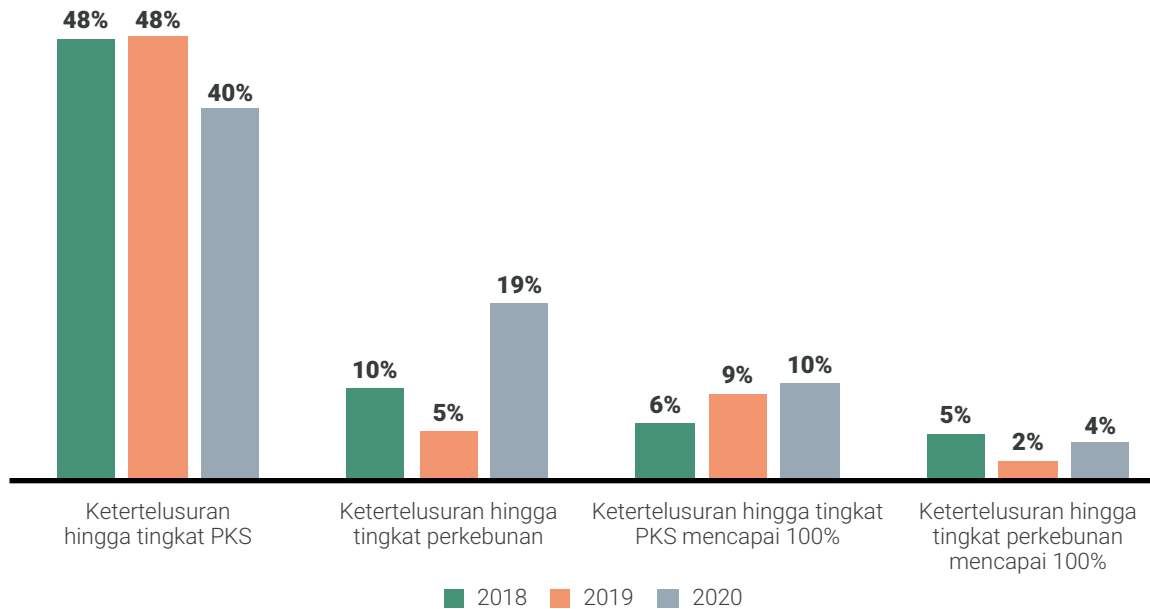


KETERTELUSSURAN

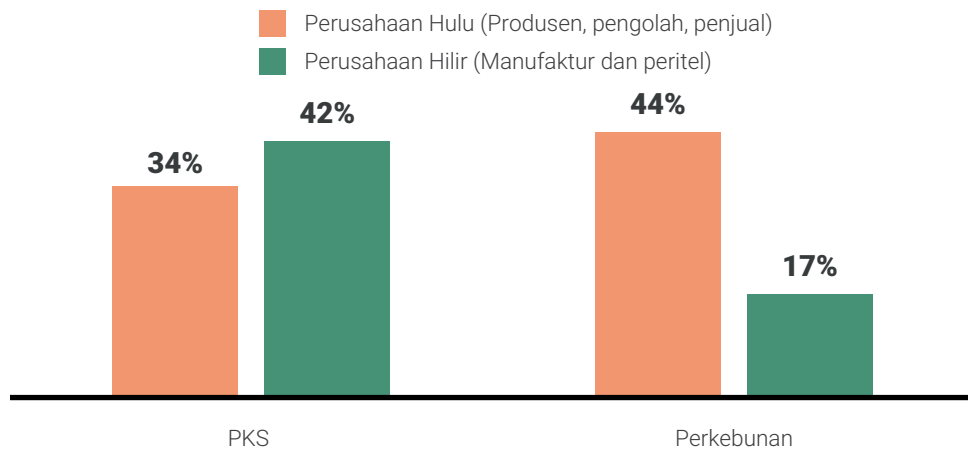
Ketertelusuran adalah kegiatan penting yang diperlukan untuk mencapai rantai nilai berkelanjutan dan memberi kepastian bahwa pasokan produk minyak sawit perusahaan tidak diperoleh dari wilayah berisiko tinggi. Dengan demikian, ketertelusuran telah menjadi prasyarat bagi sekian banyak kebijakan pemerolehan pasokan perusahaan.

Pada tahun 2020, 80% (100) perusahaan melaporkan bahwa pihaknya memiliki sistem ketertelusuran untuk melacak asal pasokan minyak sawit. **Saat ini, semakin banyak perusahaan yang mampu menelusuri pasokannya hingga ke tingkat perkebunan, yakni**

dari 10% pada tahun 2018 menjadi 19% pada tahun 2020. Angka ini diimbangi dengan menurunnya jumlah perusahaan yang ketertelusurannya hanya berakhir di pabrik kelapa sawit (PKS) (lih. Gambar 11).



Gambar 11 – Perkembangan tingkat dan cakupan ketertelusuran dari tahun 2018 hingga 2020



Gambar 12 - Perbandingan tingkat ketertelusuran berdasarkan tahap rantai pasok

Di antara perusahaan manufaktur dan peritel, hanya 42% (44) perusahaan yang dapat melacak pasokan minyak sawitnya hingga ke tingkat PKS, sementara 44% (14)

perusahaan hulu (produsen, pengolah, dan penjual) sudah dapat menelusuri pasokannya hingga ke tingkat perkebunan (lih. Gambar 12).

Perkembangan untuk mencapai ketertelusuran 100% masih terhambat, terutama bagi perusahaan sektor hilir. Namun, perusahaan hulu telah menunjukkan kemajuan yang cukup besar. Pada tahun 2020, 13% (4) perusahaan hulu melaporkan bahwa pihaknya dapat menelusuri 100% pasokannya hingga ke tingkat perkebunan. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 5%.

Beberapa perusahaan mendorong peningkatan ketertelusuran melalui penetapan target yang ambisius. Akan tetapi beberapa di antaranya tidak akan mencapai tujuan ini. Dari 22 perusahaan yang menetapkan

target untuk mencapai 100% ketertelusuran hingga ke tingkat PKS pada tahun 2020, hanya 23% (5) yang berhasil mencapai tujuannya⁵². Kesenjangan ini bahkan lebih besar dalam hal ketertelusuran hingga ke tingkat perkebunan. Dari tujuh perusahaan yang menargetkan ketertelusuran 100% pada tahun 2020, tidak ada satu pun yang melaporkan berhasil mencapainya.

Oleh sebab itu, jika perusahaan ingin berhasil menerapkan komitmen Tanpa Deforestasi, diperlukan upaya pelaksanaan yang lebih baik untuk menaikkan tingkat dan cakupan ketertelusuran⁵³.



Investasi dalam teknologi



Unilever berinvestasi pada perangkat satelit, geolokasi, blockchain, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna membangun pendekatan baru untuk pemantauan dan transparansi. Semua pemasoknya wajib menyediakan informasi ketertelusuran hingga tingkat PKS, termasuk volume sawit bersertifikat RSPO dan tidak. Lokasi PKS menyediakan informasi penting mengenai perkebunan yang berada di dalam wilayah pasokannya, termasuk perkebunan pihak ketiga serta pihak terasosiasi dan petani swadaya. Pada paruh pertama tahun 2019, **Unilever mencapai 97% ketertelusuran hingga tingkat PKS dan sudah dapat memantau lebih dari 1.600 PKS dalam rantai pasoknya, termasuk pemasok langsung dan tidak langsung**⁵⁴.



52. Mengingat siklus pengungkapan CDP berakhir pada pertengahan tahun 2020, target yang berakhir pada tahun 2019 juga disertakan.

53. Jopke, D & Schoneveld, G (2018). Corporate commitments to zero deforestation. Diperoleh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-181.pdf

54. Isian Unilever dalam kuesioner hutan CDP 2020

SERTIFIKASI

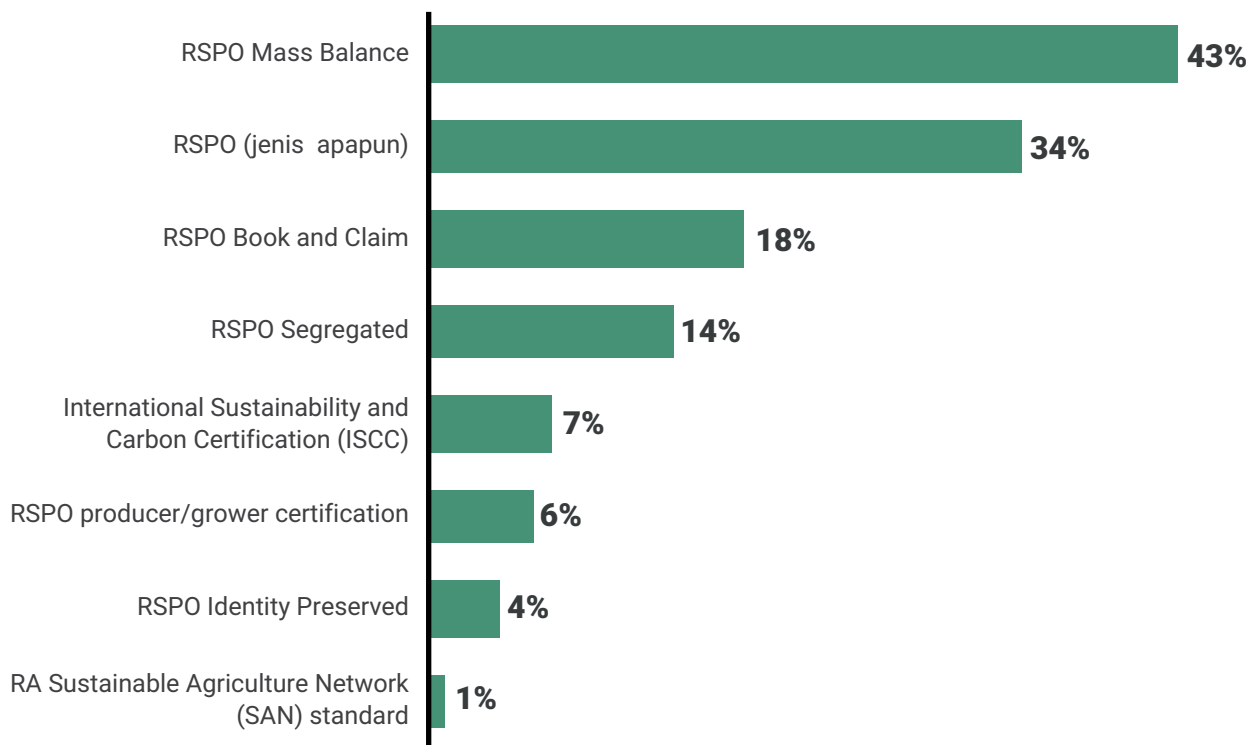
Skema sertifikasi masih menjadi perangkat penting untuk beralih ke industri minyak sawit yang bertanggung jawab. Pada tahun 2020, 90% (113) perusahaan menggunakan sertifikasi pihak ketiga untuk meningkatkan produksi dan/atau konsumsi produk minyak sawitnya secara berkelanjutan.

Volume produksi bersertifikat RSPO yang dilaporkan didominasi oleh hanya segelintir produsen dan penjual. Sebanyak 99% dari 5,6 juta metrik ton minyak sawit yang bersertifikat RSPO yang dilaporkan melalui CDP pada tahun 2020 hanya diproduksi oleh delapan perusahaan, di mana **Wilmar** berkontribusi 57% terhadap total volume tersebut.

Ada beberapa perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan keberlanjutan produksi minyak sawit dan

pasokannya melalui target sertifikasi pihak ketiga. Akan tetapi **dari 35 perusahaan yang menetapkan target bersertifikat 100% pada tahun 2020, hanya 29% (10) yang melaporkan mencapai tujuan ini.**

Mass Balance RSPO merupakan sertifikasi yang paling sering dilaporkan (lih. Gambar 13). Sementara, sertifikasi yang lebih ketat seperti Segregated dan Identity Preserved RSPO masih sangat sedikit dilaporkan.



Gambar 13 - Sertifikasi pihak ketiga yang diadopsi pada tahun 2020



Target sertifikasi



Nestlé menargetkan capaian **100% sertifikasi RSPO** untuk produk minyak inti sawit yang sudah dimurnikan pada tahun **2023**, dengan memilih pendekatan *Segregated dan Identity Preserved* RSPO yang lebih ketat. Guna mengatasi tantangan ketertelusuran dan kepatuhan pemasok, Nestlé mendukung inisiatif yang mendorong perubahan industri dan melibatkan LSM dalam mengembangkan perangkat dan membangun kapasitas di rantai pasoknya⁵⁵.

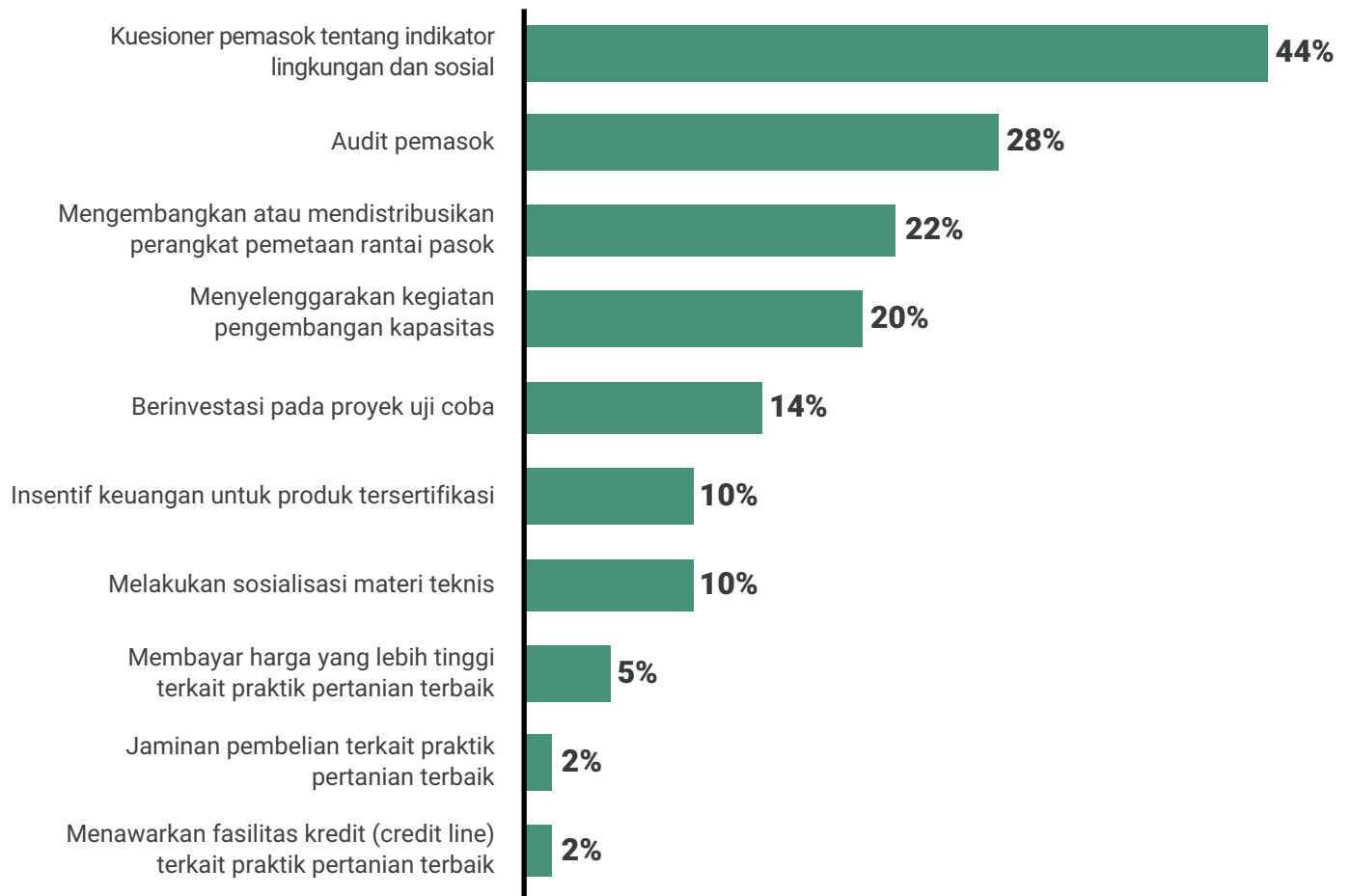


MENGUBAH RANTAI PASOK

Agar dapat melaksanakan komitmen keberlanjutannya, perusahaan perlu mempertimbangkan tindakan semua pemangku kepentingan di dalam rantai pasok minyak sawit. Meskipun produsen memiliki dampak langsung terhadap tata cara pengelolaan perkebunan sawit, perusahaan hilir juga dapat memengaruhi perubahan rantai pasok dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya dalam proses pengadaan.

Akan tetapi, mengingat perusahaan hilir sering kali tidak memiliki pengawasan langsung terhadap produksi komoditas di seluruh konsesi yang dimiliki dan dikelolanya, mereka hanya bergantung pada kepatuhan pemasok terhadap kebijakan perusahaan. Karenanya, diperlukan adanya pelibatan langsung di luar pemasok tingkat pertama untuk mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai aliran komoditas. Namun **26% (32) perusahaan yang memperoleh pasokan produk minyak**

sawit dari Indonesia tidak bekerja sama dengan pemasok langsungnya untuk meningkatkan kapasitas dalam memasok minyak sawit berkelanjutan. Lebih lanjut, hanya 33% (41) perusahaan yang mampu melibatkan seluruh pemasok dalam rantai pasoknya. Terlepas adanya risiko pasokan dari terbatasnya pelibatan pemasok, tidak sampai 50% (48) perusahaan hilir melibatkan pemasok tidak langsungnya⁵⁶.

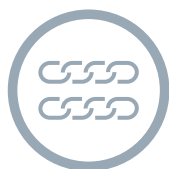


Gambar 14 - Uraian pendekatan pelibatan pemasok langsung

56. 'Hilir' di sini merujuk pada perusahaan manufaktur dan peritel yang mengisi kuesioner hutan CDP 2020 versi lengkap

Pelibatan pemasok langsung sebagian besar dalam bentuk kuesioner pemasok untuk menilai perkembangan pada indikator lingkungan dan sosial yang telah ditentukan sebelumnya, serta audit pemasok. Selain itu, tidak adanya pembiayaan praktik berkelanjutan untuk pemasok menjadi hal yang mengkhawatirkan. Produsen sawit hulu sering kali tidak dapat menerapkan praktik

pengelolaan perkebunan berkelanjutan karena kendala biaya terkait pelatihan, produk pertanian, dan sertifikasi. Meskipun demikian, hanya ada tiga perusahaan yang memberikan jaminan pembelian terkait praktik pertanian terbaik, dan hanya dua perusahaan yang menawarkan fasilitas *credit line*.



Pelibatan pemasok



Symrise melibatkan 25 pemasok langsung yang menangani volume besar dalam rantai pasok sawitnya melalui inisiatif multipemangku kepentingan dan kegiatan pengembangan kapasitas. Lebih dari 81% pemasok strategis Symrise telah berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas, termasuk Program Rantai Pasok serta webinar dan pertemuan edukatif yang diselenggarakan CDP. Untuk lebih memperkuat pelibatan pemasok dan mendorong praktik berkelanjutan, **Symrise menawarkan insentif keuangan berupa harga yang lebih tinggi untuk bahan baku berkelanjutan yang tersertifikasi dan terverifikasi.** Saat ini, insentif hanya berlaku untuk bahan bersertifikat Mass Balance RSPO, tetapi tujuan Symrise adalah semakin mengarahkan ke bahan-bahan bersertifikat *Segregated atau Identity Preserved RSPO*⁵⁷.



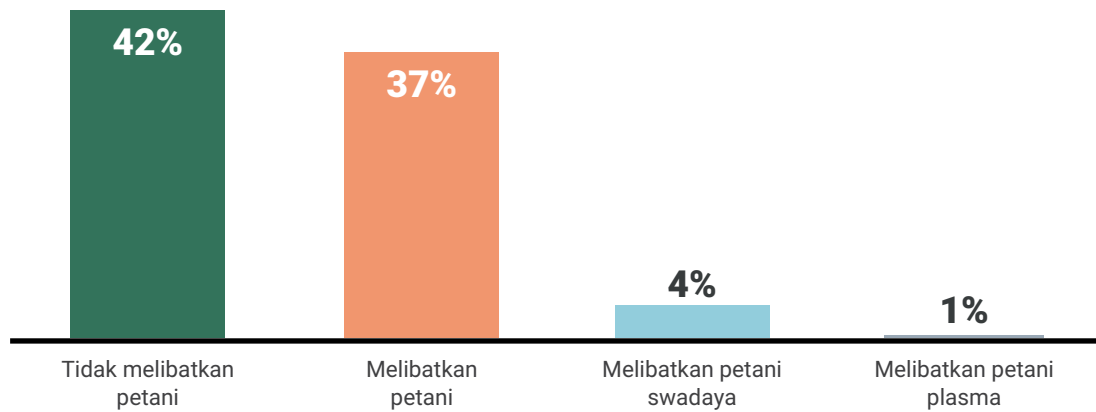


DUKUNGAN TERHADAP PETANI

Petani memiliki peran yang begitu penting dalam rantai pasok sawit. Secara keseluruhan, petani mengelola sekitar 40% perkebunan di Indonesia⁵⁸, dan jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2030⁵⁹.

Meskipun memiliki pengaruh, petani (khususnya petani swadaya) belum memiliki cukup kemampuan untuk memproduksi minyak sawit lestari. Berbeda dari petani plasma yang memperoleh manfaat dari pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berhubungan dengan kontraknya bersama PKS tertentu, petani swadaya sering kali harus berjuang untuk memperoleh sumber daya dan keahlian yang diperlukan dalam menerapkan praktik

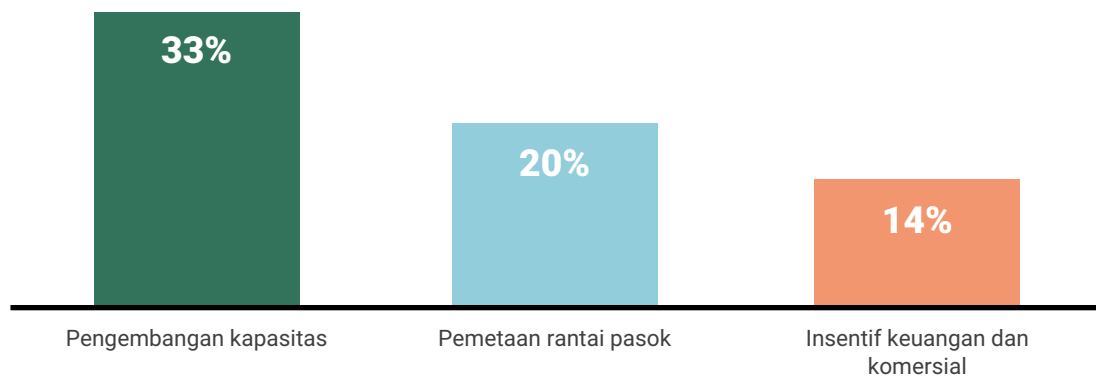
pertanian terbaik. Tanpa adanya bahan seperti pupuk dan bibit berkualitas tinggi, para petani berisiko memperoleh hasil panen yang rendah, sementara biaya sertifikasi yang terlalu tinggi membatasi akses pasar dan kemampuannya untuk menjamin pasokan produk minyak sawit lestari. Pada tahun 2017, total lahan yang bersertifikat RSPO dan/atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dikelola oleh petani swadaya kurang dari 1%⁶⁰.



Gambar 15 - Rendahnya pelibatan petani

Dari 113 perusahaan⁶¹, 42% (48) di antaranya belum melibatkan petani untuk meningkatkan keberlanjutan pasokan. Pelibatan petani oleh perusahaan sektor hilir memberi peluang dalam meningkatkan ketertelusuran pasokan, sehingga meminimalkan risiko perolehan

pasokan dari sumber yang tidak berkelanjutan. Selain itu, melalui penyediaan *input* pertanian dan pengembangan kapasitas, perusahaan berpotensi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pasokannya.



Gambar 16 - Uraian pendekatan pelibatan petani

58. SNV. (2015). Smallholder palm oil farmers can farm sustainably, but external support is necessary. Diperoleh dari <https://snv.org/update/smallholder-palm-oil-farmers-can-farm-sustainably-external-support-necessary>
59. Saragih, B (2017): Oil palm smallholders in Indonesia: Origin, development strategy and contribution to the national economy. Diperoleh dari <https://www.iopri.org/wp-content/uploads/2017/10/WPLACE-17-1.1.-OIL-PALM-SMALLHOLDER-Bungaran-Saragih.pdf>
60. Suhada, T., Bagja, B., & Saleh, S. (2018). Smallholder Farmers Are Key to Making the Palm Oil Industry Sustainable. Diperoleh dari <https://www.wri.org/blog/2018/03/smallholder-farmers-are-key-making-palm-oil-industry-sustainable>
61. Perusahaan yang mengisi kuesioner versi lengkap

Sebagian besar perusahaan melibatkan petani melalui kegiatan pengembangan kapasitas dan penyediaan input pertanian. Namun petani masih kekurangan dukungan dalam bentuk keuangan dan komersial. Hanya 14% (16) perusahaan yang menyediakan insentif keuangan dan komersial untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

Pendekatan melalui dukungan keuangan dan komersial terkait praktik pertanian terbaik, seperti membayar dengan harga yang lebih tinggi serta memberi jaminan pembelian atau kontrak jangka panjang yang berkenaan dengan komitmen terkait hutan, adalah beberapa pendekatan yang paling jarang diterapkan.



Pelibatan petani

▼▼
Neste Oyj saat ini mendukung jaringan yang terdiri atas lebih dari 36.900 orang petani sawit Indonesia. Mengingat sertifikasi adalah prasyarat bagi pemasok Neste, perusahaan ini membantu petani mengakses sertifikasi dengan mengembangkan kesadaran dan keahlian dalam praktik berkelanjutan. Sejak tahun 2017, Neste turut mendanai Wild Asia Group Scheme yang berfokus pada peningkatan keberlanjutan praktik petani di Sabah, Kalimantan. **Melalui kemitraan dengan Wild Asia dan Kuala Lumpur Kepong Berhad, Neste telah membantu 339 petani mendapatkan sertifikat (mengelola 2.080 hektar lahan)⁶².** ▼▼

MENGATASI KOMPLEKSITAS RANTAI PASOK MELALUI PENDEKATAN MULTIPEMANGKU KEPENTINGAN

Kompleksitas yang melekat pada rantai pasok minyak sawit disebutkan oleh 39% (49) perusahaan sebagai penghalang utama dalam menghapus deforestasi dan/atau konversi ekosistem alami dari rantai pasok mereka. Pendekatan Yurisdiksional merupakan perangkat yang cukup menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini. Bentuk pendekatan lanskap ini menyatukan semua pelaku terkait dalam batas administrasi politis untuk bersama-sama menyusun tujuan, menyelaraskan kegiatan, serta melakukan pemantauan dan verifikasi bersama⁶³.

Mengingat inisiatif ini memperhitungkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam lanskap yang menopang rantai pasok (termasuk petani), perusahaan dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya ketertelusuran seraya meminimalkan risiko memperoleh bahan baku dari produsen yang tidak bertanggung jawab⁶⁴. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari pemerintah, risiko terkait pelanggaran peraturan yang dihadapi perusahaan akan berkurang karena kegiatan perusahaan cenderung akan lebih sejalan dengan persyaratan peraturan yang akan berlaku.

Pada tahun 2020, 81% (101) perusahaan yang melakukan pengungkapan berpartisipasi dalam kegiatan dan/atau inisiatif eksternal untuk mendorong pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait hutan. Dari semua perusahaan ini, 70% (88) di antaranya terlibat dalam beberapa kemitraan sekaligus atau inisiatif pemangku kepentingan⁶⁵. **Meskipun merupakan pendekatan baru, 8% (10) perusahaan telah terlibat secara khusus dalam bentuk Pendekatan Yurisdiksional, terutama melalui Pendekatan Yurisdiksional RSPO untuk 'Hasilkan, Lestarkan, dan Libatkan' (Produce, Conserve, and Include/ PCI).**

Ada beberapa inisiatif yurisdiksional dan lanskap yang tengah berjalan di Indonesia. Salah satu contoh yang penting adalah **Siak Pelalawan Landscape Program (SPLP)**, yakni koalisi delapan perusahaan yang difasilitasi oleh **Daemeter** dan **Proforest**. Koalisi ini bekerja sama

untuk membantu peralihan menuju produksi minyak sawit lestari di Kabupaten Siak dan Pelalawan⁶⁶. Di bagian utara (Kabupaten Aceh Tamiang), **Unilever, Musim Mas, PepsiCo**, dan perusahaan lainnya bekerja sama dengan **Inisiatif Dagang Hijau (IDH)**, untuk membantu Kabupaten Aceh Tamiang menjadi **'Wilayah Pemasok Terverifikasi' (Verified Sourcing Area/ VSA)**, suatu metode yang mengupayakan verifikasi keberlanjutan di tingkat yurisdiksi⁶⁷. Di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, beberapa LSM dan perusahaan membentuk kelompok dan bekerja sama di bawah **Koalisi untuk Kehidupan Sejahtera dan Berkelanjutan (Coalition for Sustainable Livelihoods)** guna mendorong pengembangan ekonomi lokal, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam⁶⁸.

Inisiatif-inisiatif ini adalah tanda awal yang baik, yang menunjukkan bahwa Pendekatan Yurisdiksional mulai dipilih oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat yang layak dalam mengatasi tantangan perolehan pasokan dan keberlanjutan pada rantai nilai mereka. Tahun ini, sebagai pengakuan atas potensi yang dimiliki oleh inisiatif-inisiatif ini, dan untuk menggerakkan penyerapannya, CDP meluncurkan proyek untuk menciptakan suatu penilaian terhadap kualitas inisiatif yang sesuai standar dan konsisten oleh para pemangku kepentingannya. Peningkatan pelaporan dampak dari waktu ke waktu diharapkan akan memberi kasus bisnis yang jelas untuk mendapatkan dukungan dari pemain sektor publik seperti pemerintah daerah.

63. Proforest. (2016). Introduction to landscape or jurisdictional initiatives in commodity agriculture. Diperoleh dari <https://proforest.net/en/publications/responsible-sourcing-and-production-briefings/introduction-to-landscape-or-jurisdictional-initiatives-in-commodity-agriculture#:~:text=Landscape%20or%20jurisdictional%20initiatives%20are,commodities%20E2%80%93%20at%20a%20larger%20scale>

64. Proforest. (2016). Introduction to landscape or jurisdictional initiatives in commodity agriculture. Diperoleh dari <https://proforest.net/en/publications/responsible-sourcing-and-production-briefings/introduction-to-landscape-or-jurisdictional-initiatives-in-commodity-agriculture#:~:text=Landscape%20or%20jurisdictional%20initiatives%20are,commodities%20E2%80%93%20at%20a%20larger%20scale>

65. CDP mendefinisikan 'inisiatif multipemangku kepentingan' sebagai suatu inisiatif yang diatur oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk perusahaan sektor swasta beserta asosiasinya, organisasi masyarakat sipil (mis. LSM lingkungan dan sosial) dan mungkin organisasi petani, organisasi pemerintah, dan penyedia pengetahuan (knowledge provider).

66. Proforest. (2018). Development of a Landscape Programme in Siak and Pelalawan, Indonesia. Multi-stakeholder collaboration to achieve sustainable land use. Diperoleh dari https://proforest.net/proforest/en/files/plbn_02_dec10_final.pdf

67. IDH The Sustainable Trade Initiative. (2019). PPI Compact signed: Aceh Tamiang to become sustainable production region as first step towards VSA. Diperoleh dari <https://www.idhsustainabletrade.com/news/aceh-tamiang-to-become-sustainable-producing-region-as-1st-step-towards-vsa/>

68. Conservation International: Coalition for sustainable Livelihoods. Improving smallholder productivity and sustainable development in Indonesia. Diperoleh dari <https://www.conservation.org/projects/coalition-for-sustainable-livelihoods>



Pendekatan Yurisdiksional dan Lanskap



Golden Agri Resources (GAR) saat ini tengah mendukung pendekatan lanskap di Kabupaten Kapuas Hulu, Aceh Tamiang, dan Siak. Pemerintah Kabupaten Siak baru-baru ini menerbitkan rencana terjadwal untuk mengembangkan lanskapnya menjadi 'Kabupaten Hijau' guna mencapai keseimbangan antara konservasi lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Sebagai anggota SPLP, GAR saat ini tengah bekerja bersama *platform* kabupaten berkelanjutan, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dan pihak lainnya untuk menyusun peta jalan guna mendukung perubahan menuju minyak sawit lestari di Kabupaten Siak⁶⁹.



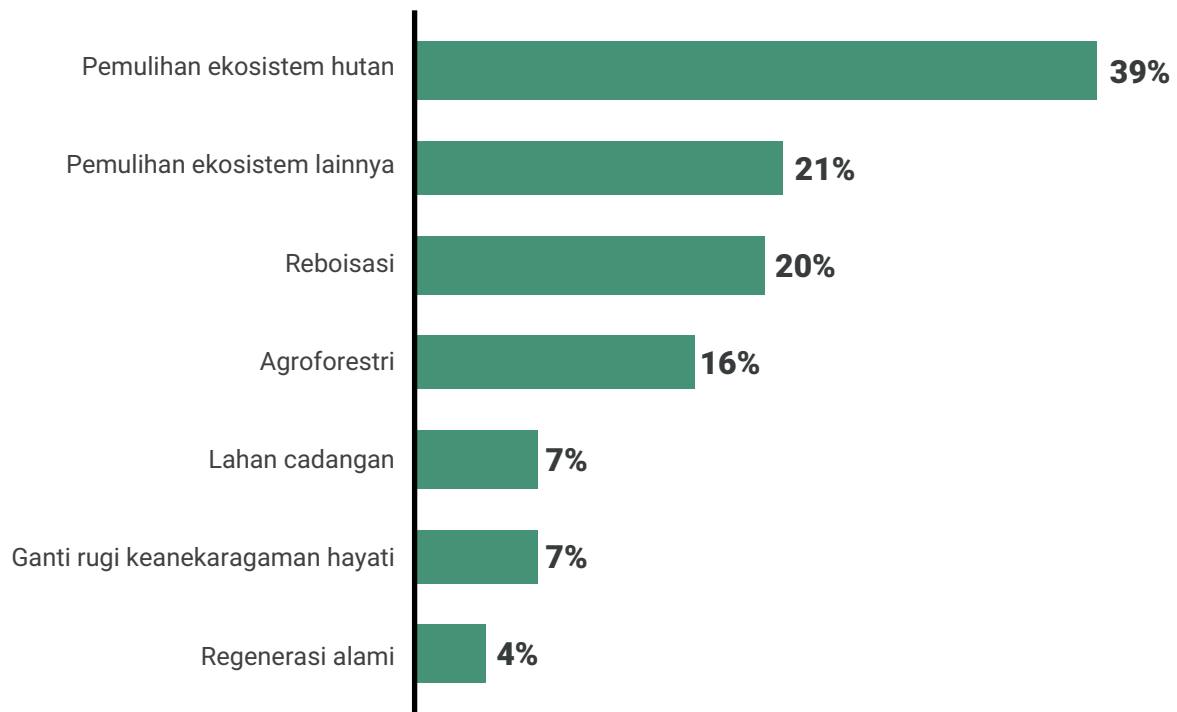
BERINVESTASI PADA PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM

Perusakan dan perambahan ekosistem alami yang terjadi terus-menerus memparah ketumpangtindihan antara manusia dan satwa liar, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi patogen dan berisiko mengakibatkan serangan pandemi lainnya di masa mendatang⁷⁰. Di Indonesia sendiri, hutan primer lembap seluas 9,5 juta hektar telah hilang antara tahun 2002 dan 2019⁷¹.

Berdasarkan laporan terbaru Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service (IPBES), sekitar satu juta spesies telah mengalami kepunahan⁷². Pendekatan pemulihan, seperti lahan cadangan dan agroforestri, sering kali mampu memulihkan fungsi alami ekosistem, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kemampuan ekosistem dalam memberikan jasa ekosistem yang penting. Deklarasi New York untuk Hutan dan Bonn Challenge telah menyoroti pentingnya pemulihan lanskap hutan terdegradasi. Analisis terbaru menunjukkan bahwa pemulihan 350 juta hektar lanskap hutan terdegradasi

dapat menghasilkan manfaat ekonomi daerah sebesar 0,7-9 triliun Dolar AS⁷³.

Sebanyak 50% (56) perusahaan yang memproduksi, memperoleh pasokan, atau menggunakan produk minyak sawit dari Indonesia mendukung atau menerapkan inisiatif yang berfokus pada pemulihan dan/atau perlindungan ekosistem di beberapa lokasi operasinya yang ada di seluruh dunia. **Sebanyak 14% (16) telah menerapkan atau mendukung inisiatif di Indonesia. Pada tahun 2020, sebanyak 22 inisiatif telah dilaporkan, yang mewakili area seluas 17,8 juta hektar yang dilindungi atau dalam restorasi.**



Gambar 17 - Uraian pendekatan konservasi dan pemulihan yang dilaporkan oleh perusahaan

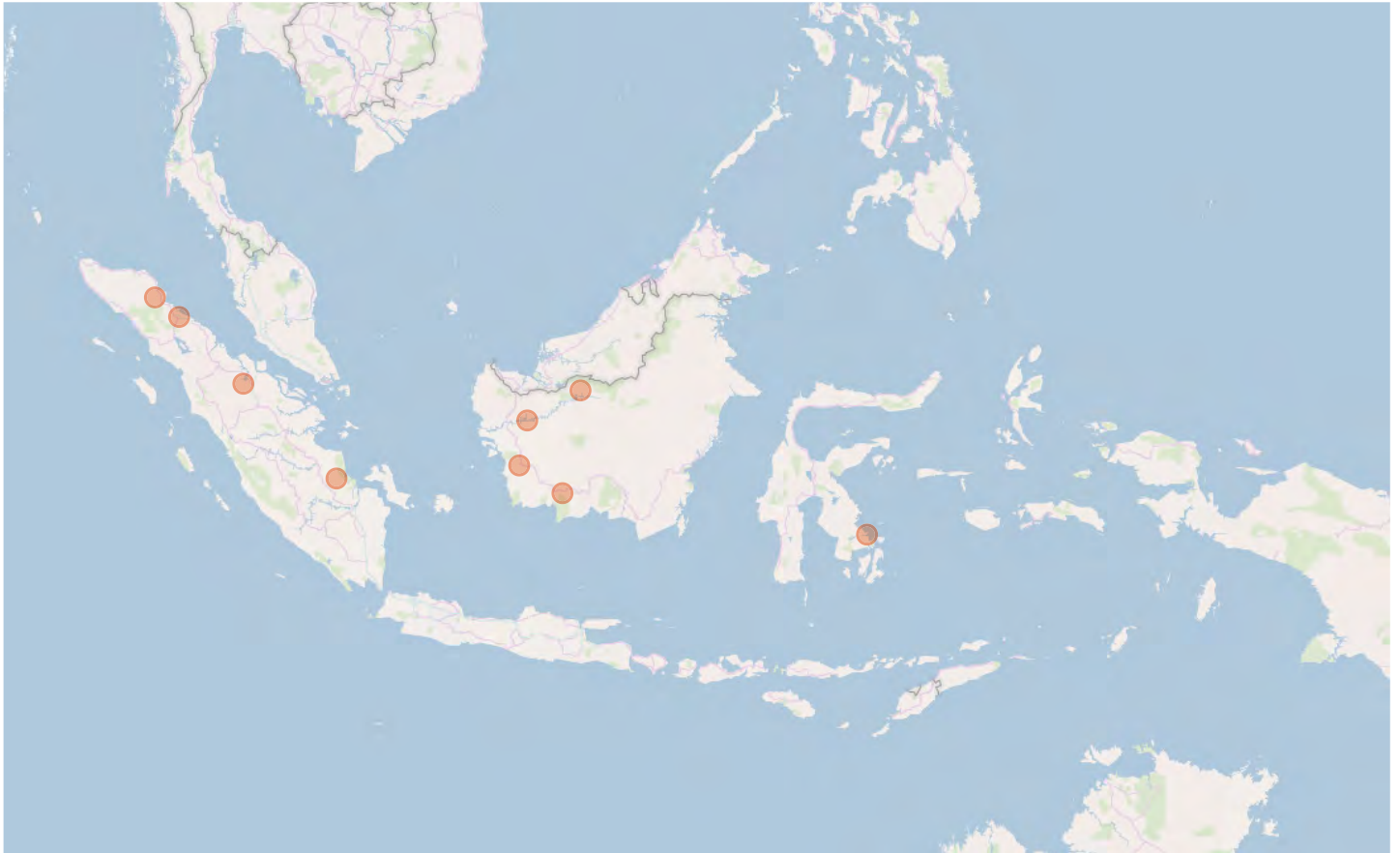
70. Quinney, M. (2020). Covid-19 and nature are linked. So should be the recovery. Diperoleh dari <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-nature-deforestation-recovery/>

71. WRI. Global Forest Watch. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN>

72. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity Ecosystem Service. (2019). Report on the Plenary of Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work of its seventh session.

32 Diperoleh dari https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf?file=1&id=35329&type=node

73. Verdone, M. and A. Seidl. (2017). "Time, space, place, and the Bonn Challenge global forest restoration target", Restoration Ecology, Vol. 25/6, pp. 903-911, diperoleh dari <http://dx.doi.org>



Gambar 18 - Lokasi berlangsungnya proyek pemulihan



Pembiayaan restorasi ekosistem



Firmenich saat ini sedang dalam proses pelibatan dengan Livelihoods Carbon Funds (LCF) untuk membiayai proyek pemulihan ekosistem, agroforestri, dan energi perdesaan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat perdesaan dan meningkatkan pendapatan petani. Program ini memberikan pembiayaan di muka untuk pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek selama 10 hingga 20 tahun. Firmenich dan investor lainnya akan menerima pembayaran berbasis hasil dalam bentuk kredit karbon. **Program ini memiliki satu juta penerima manfaat serta akan menghasilkan penanaman 130 juta pohon, dan distribusi kompor yang efisien bagi 120.000 kepala keluarga. Selama 20 tahun berikutnya, akan ada 10 juta ton CO₂ yang terserap atau dapat dihindari melalui pelaksanaan program ini⁷⁴.**



KESIMPULAN

Indonesia adalah wilayah dengan pasokan produk minyak sawit mentah yang penting bagi dunia. Hutan dan keanekaragaman hayati di Indonesia akan terus terancam oleh konversi pertanian yang didorong pasar dan bersifat ilegal. Agar Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, maka penurunan laju deforestasi yang terjadi baru-baru ini harus dipertahankan.

Dengan adanya permintaan dari investor, konsumen, dan regulasi akan minyak sawit berkelanjutan, terdapat kasus bisnis yang jelas untuk mengubah rantai nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menyadari risiko terhadap reputasi dan pasar yang dapat muncul jika terus menerapkan praktik yang sudah ada (business as usual). Pandemi Covid-19 baru-baru ini memberi kita semua pelajaran mengenai risiko sosial yang lebih luas, yang dapat terjadi jika kita terus merusak ekosistem alami. Guna memitigasi risiko ini dan mengakses peluang keuangan yang ditawarkan rantai nilai bebas deforestasi, perusahaan perlu memacu ambisinya dengan menetapkan target yang jelas dan disertai pelaksanaan kolaboratif di lapangan. Meskipun terdapat pengawasan yang kuat di tingkat direksi terhadap persoalan terkait hutan, komitmen khusus NDPE (terutama di antara perusahaan-perusahaan hilir) masih minim. Rendahnya niat untuk menjalankan komitmen NDPE ini tercermin di lapangan, di mana sebagian besar perusahaan belum mendukung atau menerapkan proyek pemulihan dan konservasi ekosistem.

Perusahaan yang berupaya menghapus deforestasi dari rantai nilainya terhalang oleh kompleksitas yang melekat pada rantai pasok minyak sawit. Guna meningkatkan pengawasan terhadap aliran komoditas, perusahaan perlu memacu ambisinya untuk menguatkan ketertelusuran hingga tingkat perkebunan serta bekerja bersama pemasok langsung dan tidak langsung untuk menanggulangi kesenjangan kapasitas dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan NDPE. Tindakan ini harus mencakup pengadaan insentif keuangan agar praktik berkelanjutan diterapkan secara luas, serta menyingkirkan hambatan untuk memperoleh sertifikasi. Hal terpenting adalah diperlukannya pengungkapan yang lebih luas oleh produsen Indonesia dalam memberikan informasi terperinci mengenai risiko, peluang, dan dampak di dalam areal yang dikelolanya, serta mendukung akuntabilitas dan tindakan kolaboratif yang lebih besar.

Metode multipemangku kepentingan seperti Pendekatan Yurisdiksional masih dalam tahap awal, akan tetapi terdapat tanda-tanda awal yang menunjukkan bahwa perusahaan tengah menggunakan inisiatif ini bersama dengan metode sertifikasi untuk meningkatkan keberlanjutan pasokannya. Kolaborasi ini sangat menjanjikan dalam menyatukan upaya lintas sektor untuk mengatasi deforestasi dan menerapkan praktik berkelanjutan secara luas di seluruh Indonesia. Terlepas dari tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi dunia saat ini, penting bagi perusahaan untuk tidak melupakan peluang dari upaya meningkatkan keberlanjutan dan melindungi keamanan pasokan minyak sawit mereka.



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Britania Raya dan Eropa

Morgan Gillespy

Director, Forests
morgan.gillespy@cdp.net

Sareh Forouzesh

Associate Director, Forests
sareh.forouzesh@cdp.net

Hong Kong dan Asia Tenggara

Pratima Divgi

Director, Hong Kong, Southeast
Asia, Australia and New Zealand
pratima.divgi@cdp.net

Rini Setiawati

Manager, Power of Procurement
Project
rini.setiawati@cdp.net

Wisnu Rizki Wibisono

Corporate Engagement Officer,
Forests
wisnu.wibisono@cdp.net

CDP Worldwide

Level 4
60 Great Tower Street
London EC3R 5AD
Tel: +44 (0) 20 3818 3900
forest@cdp.net
www.cdp.net